

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika. (2022). *Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota*. Retrieved from <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/928>
- BPKAD Kota Bandar Lampung. (2021). *Rencana Strategis (2021-2026) Kota Bandar Lampung*.
- Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Eko Nur Surachman, Dian Handayani, dan Tim Penyusun. (2020). *Modul Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Haryanto. (2015, Agustus 31). *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. Retrieved Februari 28, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>
- Irfan. (2021, 01 11). *Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah*. Retrieved 02 28, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong-kemandirian-daerah-melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah/>
- Kementerian Keuangan. (2020, 04 27). *Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 di Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved 02 28, 2022, from <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19>
- Kementerian Keuangan. (2021, 04 15). *Menkeu: Refocusing TKDD Penting Untuk Penanganan Pandemi Covid-19*. Retrieved 02 28, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-refocusing-tkdd-penting-untuk-penanganan-pandemi-covid-19/>
- Kementerian Keuangann. (2020, 08 27). *Ini Beragam Jenis TKDD Sebagai Bentuk Desentralisasi Fiskal*. Retrieved 02 27, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-beragam-jenis-tkdd-sebagai-bentuk-desentralisasi-fiskal/>

Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.

Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar AKuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2019 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung*.

Simanjuntak, R. (2001). *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization*. Jakarta: LPEM-UI.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.